











dibidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, UD, Yayasan, koperasi, dll) nisabnya adalah 20 dinar. Artinya, jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas.

Dari penjelasan di atas maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar, atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 % sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

Demikian juga seharusnya yang berkembang di UD. Lima Lapan Sampang yang merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang pengadaan dan penyediaan bahan material konstruksi bangunan yang berada di Jl. Diponegoro No. 39 B Sampang dan merupakan salah satu distributor pengadaan dan penyediaan bahan material bangunan terbesar di Sampang.

Dalam perkembangan sistematika pembagian zakatnya, UD. Lima Lapan Sampang mengikuti tuntutan adat-istiadat yang berlaku di daerah, yaitu melihat dari pandangan secara lahiriah terhadap pola kehidupannya dibandingkan dari masyarakat sekitarnya, baik itu berupa bangunan rumah, kendaraan bermotor, serta kehidupan sehari-harinya, tanpa melihat secara perhitungan yang telah ditetapkan oleh fiqh tentang ketentuan pembagian zakat bagi sebuah harta

perdagangan, dari bagaimana atau apakah sudah mencapai nis}ab ataupun cara penghitungan terhadap zakat harta perdagangan.

Sistim yang digunakan dalam UD. Lima Lapan Sampang ketika akan mengeluarkan kewajiban zakatnya tanpa terlebih dahulu melakukan perhitungan besaran zakat yang telah ditetapkan oleh syari'ah, tapi dengan cara mengeluarkan beberapa persentase dari hartanya dengan melihat golongan-golongan kaum fakir dilingkungannya yang kemudian dibagikan kepada mereka dengan kadar ukuran yang dianggap ukuran zakat di daerah itu.

Dalam ketentuan yang seharusnya dilakukan oleh UD. Lima Lapan Sampang tersebut harusnya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh fiqh, yaitu dengan cara melakukan penghitungan terhadap semua asset perdagangan, baik itu berupa modal, utang piutang, keuntungan maupun kerugian, dan spesifikasi terhadap harta yang wajib dizakati atau tidak yang nantinya akan diketahui apakah sudah mencapai nishob atau tidak untuk dikeluarkan jika sudah waktunya.

Maka dari latar belakang permasalahan yang terjadi di atas, penulis ingin membahas dalam skripsi yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Usaha Dengan Modal Utang-Piutang di UD. Lima Lapan Sampang”.















